

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
ORGANISASI NIRLABA**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Daftar Isi	i
II. Surat Pernyataan Pengurus	ii
III. Laporan Auditor Independen	iii
IV. Laporan Posisi Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Per 31 Desember 2020 dan 2019	1
V. Laporan Aktivitas Partai Gerakan Indonesia Raya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2
VI. Laporan Arus Kas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	3
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	4 - 22



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, MA
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Bendahara Umum
2. Nama : Satrio Dimas Adityo, MBA
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Wakil Bendahara Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Partai Gerindra.
2. Laporan keuangan Partai Gerindra telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Partai Gerindra dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Partai Gerindra tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Partai Gerindra.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 April 2023


Satrio Dimas Adityo, MBA
Wakil Bendahara Umum




Thomas A.M Djiwandono, MA
Bendahara Umum

Laporan No. 00081/2.0999/AU.2/11/0138-5/1/IV/2023

Laporan Auditor Independen

**Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
(Organisasi Nirlaba)**

Kami telah mengaudit posisi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

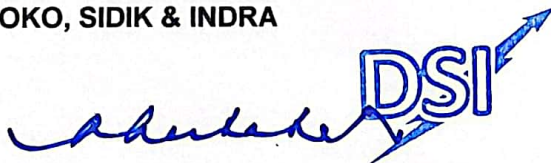
Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Laporan keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum merupakan laporan konsolidasian Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 676 Tahun 2003 tentang tata administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik, serta laporan dana kampanye peserta pemilihan umum didalam Bab.I – Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) dan (7) menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan partai politik adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pimpinan partai politik di tingkat pusat dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan tahunan pengurus partai politik di tingkat Propinsi yang mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan partai politik pada jajarannya di daerah sampai dengan tingkatan yang paling rendah.

Opini

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak hal dijelaskan dalam paragraf Basis untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kantor Akuntan Publik
DJOKO, SIDIK & INDRA



Drs. Abubakar Sidik, MS, CPA, CA
NRAP AP. 0138

Jakarta, 17 April 2023



PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<u>ASET</u>			
	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
Kas dan bank	2b,3	5.867.009.462	9.927.118.369
Piutang lain-lain	4	50.611.362.051	39.573.250.000
Biaya dibayar dimuka	2c,5	7.447.200	34.255.700
Aset Terikat Untuk Investasi :	2d,6		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 3.512.002.059 tahun 2020 dan Rp.3.252.220.500 tahun 2019		677.516.541	337.307.500
JUMLAH ASET		<u>57.163.335.254</u>	<u>49.871.931.569</u>
<u>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</u>			
LIABILITAS			
Biaya yang masih harus dibayar	7	44.400.000	132.000.000
Hutang lain-lain	8	161.059.900	161.059.900
Jumlah Liabilitas		<u>205.459.900</u>	<u>293.059.900</u>
ASET NETO	2g		
Tidak Terikat		56.957.875.354	49.578.871.669
Terikat Temporer		-	-
Jumlah Aset Neto		<u>56.957.875.354</u>	<u>49.578.871.669</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>57.163.335.254</u>	<u>49.871.931.569</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)**

LAPORAN AKTIVITAS

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020		2019	
		Tidak Terikat	Terikat Temporer	Tidak Terikat	Terikat Temporer
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT					
Penerimaan					
Kas Negara melalui APBN	2e,9	17.594.839.000	-	15.461.241.999	-
Iuran anggota Fraksi Gerindra DPR RI	2e,10	11.758.500.000	-	10.678.500.000	-
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	2e,11	130.647.073.791	-	73.556.376.338	-
Sumbangan pihak ketiga	2e,12	-	-	8.442.500.000	-
Sumbangan Pengurus	2e,13	600.000.000	-	2.000.000.000	-
Lain-lain	2e,14	416.400.985	-	313.798.196	-
Jumlah Penerimaan		161.016.813.776	-	110.452.416.533	-
Pengeluaran					
Beban penerimaan kas melalui APBN	2e,15	17.594.839.000	-	15.461.241.999	-
Beban kegiatan DPP	2e,16	956.838.325	-	648.000.000	-
Beban program bidang	2e,17	320.854.752	-	4.405.391.250	-
Beban kegiatan sayap Partai	2e,18	583.200.000	-	415.650.000	-
Beban bakti sosial	2e,19	633.062.000	-	180.400.000	-
Beban publikasi dan kehumasan	2e,20	8.487.650.500	-	7.157.085.000	-
Beban umum dan administrasi	2e,21	125.040.258.657	-	36.706.025.132	-
Beban lain-lain	2e,22	21.106.857	-	13.200.350	-
Jumlah Pengeluaran		153.637.810.091	-	64.986.993.731	-
KENAIKAN ASET NETO		7.379.003.685	-	45.465.422.802	-
ASET NETO AWAL TAHUN		49.578.871.669	-	4.113.448.867	-
ASET NETO AKHIR TAHUN		56.957.875.354	-	49.578.871.669	-

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)

LAPORAN ARUS KAS

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas Dari :		
Kas Negara melalui APBN	17.594.839.000	15.461.241.999
Iuran anggota DPR RI	11.758.500.000	10.678.500.000
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	130.647.073.791	73.556.376.338
Sumbangan pihak ketiga	-	8.442.500.000
Sumbangan pengurus	600.000.000	2.000.000.000
Penerimaan lain-lain	416.400.985	313.798.196
Jumlah	<u>161.016.813.776</u>	<u>110.452.416.533</u>
Pengeluaran kas untuk :		
Beban kegiatan Partai	(153.356.921.675)	(64.544.315.427)
Piutang lain-lain	(11.038.112.051)	(39.553.450.000)
Biaya dibayar dimuka	26.808.500	6.413.500
Biaya yang masih harus dibayar	(87.600.000)	38.500.000
Hutang lain-lain	-	(5.500.000)
Beban lain-lain	(21.106.857)	(13.200.350)
Jumlah	<u>(164.476.932.083)</u>	<u>(104.071.552.277)</u>
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk)		
Aktivitas Operasi	<u>(3.460.118.307)</u>	<u>6.380.864.256</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(599.990.600)	(120.823.000)
Kas Neto Yang Digunakan Untuk		
Aktivitas Investasi	<u>(599.990.600)</u>	<u>(120.823.000)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(4.060.108.907)	6.260.041.256
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	<u>9.927.118.369</u>	<u>3.667.077.113</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>5.867.009.462</u>	<u>9.927.118.369</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I. UMUM

Partai Gerakan Indonesia Raya selanjutnya disebut (Gerindra) merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Partai Gerindra juga merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Pebruari 2008 dari Liena Latief, SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 30 September 2020 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH. mengenai perubahan Susunan Pengurus Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Perubahan akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

1. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di Tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
2. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.
3. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
4. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat DPP, DPD dan DPC atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
5. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
6. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
7. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
8. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam Pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
9. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
10. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
11. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
12. Memberi penghargaan sesuai ketentuan AD/ART atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
13. Memberikan sanksi sesuai ketentuan AD/ART, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
14. Penyelenggarakan Kongres.
15. Penyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
16. Penyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina
17. Penyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
18. Penyelenggarakan konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
19. Membentuk Badan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
20. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

21. Menyenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
22. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
23. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
24. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
25. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat DPP, DPD dan DPC.
26. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sejumlah 34 (Tiga puluh empat) Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sejumlah 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) Cabang.

Tujuan pembentuk organisasi adalah :

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan.
 5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Untuk menunjang pelaksanaan aktivitasnya Partai Gerakan Indonesia Raya didukung dengan dana yang diperoleh dalam bentuk :

1. Iuran anggota dan iuran Pengurus Partai
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat
3. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
4. Sumbangan penghasilan dari anggota DPR dan DPRD

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 30 September 2020 dari Ilmiawan Dektrit Supatmo,SH,MH Notaris di Jakarta, susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	: Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Pemenangan Pemilu	: Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH
Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu	: Prasetyo Hadi
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi	: Rohmat Marzuki
Ketua Bidang Kaderisasi	: Eko Wibowo
Ketua Bidang Sekolah Kader	: Kharisma Febriansyah
Ketua Bidang Keanggotaan	: Oktasari Sabil
Ketua Bidang Organisasi Sayap	: Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - *lanjutan*

Ketua Bidang Pembinaan Pengurus Luar Negeri	: Hj. Himmatul Aliyah, S, Sos, M.Si
Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota Legislatif Daerah	: Bambang Haryadi, SE
Ketua Bidang Pemberdayaan Kepala Daerah	: Andi Seto Gadysta Asapa, SH, LL.M
Ketua Bidang Logistik Partai	: Adnani Taufiq, S. Sos.
Ketua Bidang Saksi Pemilu	: Rizaldy Danar Priambodo
Ketua Bidang Pemetaan dan Basis Pemilih dan TPS	: Ricky HS Tamba
Ketua Bidang Kerjasama dengan Penyelenggaraan Pemilu	: Victor Da Costa
Ketua Bidang Kampanye Digital	: Ir. Setyoko
Ketua Bidang Rekayasa Teknologi	: Gumilar Satriawan, ST
Ketua Bidang Penguatan Jaringan Kader	: Hj. Novita Wijayanti, SE, MM
Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	: Haerul Saleh, SH
Ketua Bidang Pengelolaan Opini Publik	: Vasco Ruseimy
Ketua Bidang Pemberdayaan Media Sosial	: Lie Suratno
Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan LSM	: Ir. Iwan Sumule
Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri	: Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	: Irawan Ronodipuro
Ketua Bidang Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika	: Adien Algadri
Ketua Bidang Kerjasama Amerika dan Eropa	: Edin Hadzalic, B. Sc
Ketua Bidang Timur Tengah	: H. Ricky Kurniawan, Lc.
Ketua Bidang Kerjasama ASEAN	: Drs. Marta Yandry, SE, SH, MM
Ketua Bidang Kerjasama Multilateral	: Ilman Zikri
Ketua Bidang Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia	: George Edwin Sugiharto
Ketua Bidang Hukum Internasional	: Irmawaty Habie, SH
Ketua Bidang Perjanjian Antar Negara	: Hafif Assaf, SIP, MA
Ketua Bidang Kajian Kerjasama antar Parlemen	: Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.
Ketua Bidang Komunikasi Internasional	: dr. Irene, M.Sc, Sp.A.
Ketua Bidang Publikasi Luar Negeri	: Drs. Beydra Yendi, MBA
Ketua Bidang Pendidikan Luar Negeri	: Abdul Hakam Nagib
Wakil Ketua Umum Bidang Adeologi, Politik Pemerintahan. Disiplin Partai dan Informasi Strategis	: Sugiono
Ketua Bidang Informasi dan Kajian Strategis	: Danang Wicaksana Sulistya
Ketua Bidang Pembinaan Ideologi	: Ibnu Ariebowo, SH
Ketua Bidang Pembinaan Kerja Sama antar Lembaga Non Parpol	: Abdur Rahim Hasan
Ketua Bidang Kerja Sama Antar Partai Politik	: H. Abdul Harris Bobihoe, S.Sos, M.Si.
Ketua Bidang Pembinaan Disiplin dan Tradisi Partai	: Chusni Mubarak, SH, MM.MH.
Ketua Bidang Informasi dan Teknologi	: Herry Sumartono
Ketua Bidang Pengolahan Data Strategis dan Pemetaan Geodemokonsos	: Mochamad Hengky Kususma Praja Cahyono
Ketua Bidang Pengelolaan Informasi	: Benny Gusman Sinaga, ST.
Ketua Bidang Pengelolaan Basis Data Kepartaian	: Fadli Tri Hartono
Ketua Bidang Penataan Aset Partai	: Farouk Mateus L. Osorio, SE, MM
Ketua Bidang Dokumentasi dan Sejarah Partai	: Bachren Luskardinul
Ketua Bidang Pemerintahan Umum	: Dr. H. Azikin Soltan, M.Si.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I. UMUM - *lanjutan*

Ketua Bidang Pelaksana Otonomi Daerah	: Drs. H.M. Asrian Mirza, MM
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Pemerintah	: Ade Rezki Pratama, SE, MM.
Ketua Bidang Kebijakan Keuangan Daerah	: H. Dairul, SE, M.Si
Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
Ketua Bidang Penyiaran	: Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si, MM
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup	: Edhy Prabowo, MM., MBA
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan	: Dr. Safri, SE, M.Si.
Ketua Bidang Pertanian	: G. Budisatrio Djiwandono
Ketua Bidang Peternakan	: Agus Handoko
Ketua Bidang Perdagangan	: Heri Gunawan, SE
Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal	: Ardhya Pratiwi S, SE
Ketua Bidang Pertanian	: Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, MBA
Ketua Bidang Pendapatan Negara	: H.M Husni, SE
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan	: Drs. H. Mulyadi, MMA
Ketua Bidang Perindustrian	: Mohamad Hekal, MBA
Ketua Bidang BUMN	: Alex Yordanto
Ketua Bidang Ekspor dan Impor	: Drs. H. Subarna, SE, M.Si
Ketua Bidang Ekonomi Internasional	: Ahmad Bahtiar Sebayang, SE
Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	: Iis Edhy Prabowo, S.Hum, MM
Ketua Bidang Ekonomi Makro	: Andi Debby Yudhista Asapa, SH
Ketua Bidang Ekonomi Mikro	: Bei Mahaya Djody
Ketua Bidang Transmigrasi	: Eddy DJ. Wibowo, SH
Ketua Bidang Sosial Ekonomi Pertanian	: Farida Eddy
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	: Waskita Rini
Ketua Bidang Agraria	: Renny Astuti, SH, Sp.N
Ketua Bidang Pertambangan	: Boegi Nugraha
Ketua Bidang Pariwisata	: Ali Zamroni, S.Sos.
Ketua Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata	: Ir. Hj. Athea Sarastiani, MM
Ketua Bidang Pengembangan dan Pelestarian Objek Wisata	: Martini, SE
Ketua Bidang Transmigrasi	: Sammy Djusman, SE
Ketua Bidang Kerjasama Ekonomi	: Dr. Angga Wira, MM
Ketua Bidang Kesejahteraan Nelayan	: Fernando Jose Lemos Osorio Soares, ST
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan	: Andhika Surya Gumilar
Ketua Bidang Perhubungan	: Muh. Husein Fadlulloh, B,Bus,MM
Ketua Bidang Lingkungan Hidup	: Rudi Wijaya, SE
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	: Siti Juliati
Ketua Bidang Kehutanan	: Ir. KRT.H. Darori Wonodipuro, MM
Ketua Bidang Pertanahan	: Yoelius Dwi Hermanus, SH, M.Si.
Ketua Bidang Budaya Perikanan	: Hardjono Siswanto, SE, M.Si
Ketua Bidang Ketahanan Pangan	: drh. Muchlindo Apriliast
Ketua Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi	: Muhammad Habibie
Ketua Bidang Energi dan Kelistrikan	: Ramson Siagian, MBA
Ketua Bidang Energi Terbarukan	: Agus Trianto

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan	: Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun
Ketua Bidang Pertahanan Darat	: Mayjen TNI (Purn) Arri Sujono
Ketua Bidang Pertahanan Laut	: Laksma TNI (Purn) Rajamorni Harahap, SE, MM
Ketua Bidang Pertahanan Udara	: Marsda TNI (Purn) Hasan Londang, M.SS
Ketua Bidang Ketahanan Nasional	: Ikhwan Amirudin, SE, MM
Ketua Bidang Pertahanan Daerah	: Agustina Foeh
Ketua Bidang Bela Negara	: Dadeng Saepudin, SE
Ketua Bidang Keamanan Nasional	: Kolonel TNI (Purn) Suhary, Z.B.
Ketua Bidang Kerjasama dengan TNI/Polri	: Brigjen Pol. (Purn) Drs. Wenny Warouw
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	: Yudi Handoko
Ketua Bidang Pemulihan Psikologi Pasca Bencana	: Dra. Julia Chartika, SH
Ketua Bidang Penanggulangan Terorisme	: Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc

Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan, Koperasi dan UMKM	: Dr. Ferry Joko Yuliantono, SE,Ak,Msi.
Ketua Bidang Penggalangan Massa	: Didik Hariyanto
Ketua Bidang Penggalangan Kaum Perempuan	: Ety Suryo
Ketua Bidang Relawan	: Dra. Suria Ati Kusuma
Ketua Bidang Kerjasama Organisasi Perempuan	: Edriana, SH, MA
Ketua Bidang Sosial	: Yetti Wulandari, SH
Ketua Bidang Pendayagunaan Ekonomi Rakyat	: M. Mujiburohman
Ketua Bidang Koperasi	: Adji Gutomo
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Rakyat	: Setyo Edy
Ketua Bidang Komoditas Pasar Rakyat	: Hj. Aisyah Tiar Arsyad, SE, MBA
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	: Widiyanto Saputro
Ketua Bidang Ekonomi Digital	: Hj. Gina Fadlia Swara, SE, MM
Ketua Bidang UMKM	: Kiki Setiawan
Ketua Bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima	: Ir. Lisca Suryani

Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan	: drg. Putih Sari
Ketua Bidang Kesehatan	: dr. Benyamin Paulus Oktavianus, Sp.P.
Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat	: Ir. Sri Meliyana
Ketua Bidang Kesehatan Ibu dan Anak	: Grace Rosalyn
Ketua Bidang Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	: Erni Djohan, S.Pd, M.Si.
Ketua Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Gizi	: Noveria Parasari
Ketua Bidang Keluarga Berencana	: Dr. Paramitha Sudarto, MPH
Ketua Bidang Sarana Prasarana Kesehatan	: dr. Selvi Relita Ftri, MARS.
Ketua Bidang Farmasi	: dr. Mirna Annisa, M.Si.
Ketua Bidang Tenaga Kesehatan	: Dedi Supratman, SKM, MKM
Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	: Ir. Pertiwi Awilda, MBA
Ketua Bidang Kesehatan Tradisional	: dr. Suir Syam, M.Kes
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	: dr. Felicitas Tallulembang
Ketua Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat	: Dra. Meiske Margaretha Mangalun, SE,MM

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - *lanjutan*

Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	: dr. Muhammad Atras Mafazi, MM
Ketua Bidang Kesejahteraan Tenaga Pendidik	: dr. Bambang Susanto
Ketua Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan	: Obon Tabroni
Ketua Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Terampil	: Dewi Sigar
Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda, Perempuan dan Anak	: Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo
Ketua Bidang Kepemudahan	: Aryo P.S. Djojohadikusumo
Ketua Bidang Olahraga	: Abdul Karim Aljufri
Ketua Bidang Penanggulangan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	: dr. Hj. Asri Kahar Muang, MH.Kes.
Ketua Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	: Harwendro Adityo Dewanto
Ketua Bidang Perlindungan Hak dan Kesetaraan Perempuan	: Dra. Anita Ariyani
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	: Sasha Tutuko
Ketua Bidang Tenaga Kerja Wanita	: Ir. Dwitaria Gunadi
Ketua Bidang Pemberdayaan Kader Perempuan	: Ir. Hj. Endang Sulistiorini
Ketua Bidang Kependudukan	: Saleh Ramli
Ketua Bidang Human Trafficking	: Hj. Jamilah Abdul gani, SH, MH
Ketua Bidang Perlindungan Anak dan Remaja	: Dani Irawati Soenarso, M.Si.
Ketua Bidang Pengembangan Potensi Anak dan Remaja	: Athina Siti Khadijah P
Ketua Bidang Pengelolaan Lingkungan Ramah Anak dan Remaja	: Dinda Fajria
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi	: Habiburokhman, SH, MH
Ketua Bidang Advokasi	: M. Maulana Bungaran, SH, MH.
Ketua Bidang Hukum	: Munathsir Mustaman, SH
Ketua Bidang Hukum ITE	: M. Said Bakhrie, S.Sos,SH,MH.
Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu	: RR. Duni Nibayati, SH
Ketua Bidang Kajian Hukum	: Hendarsam Marantoko, SH,CLA
Ketua Bidang Konstitusi	: Benny Uzer, SH
Ketua Bidang Konstitusi Tata Negara	: Eva Yulianti, SH
Ketua Bidang Advokasi Kepartaian	: Yunico Syahrir, SH
Ketua Bidang Hukum Ekonomi	: Henoeh Thomas, SE, MM
Ketua Bidang Hukum Perdagangan	: Ade Salamah, SH, MH.
Ketua Bidang Advokasi Perempuan dan Anak	: Dermawati Harefa, SH
Ketua Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual	: Andika Sefatia Mendrofa
Ketua Bidang Layanan Hukum	: Muhammad Randy Effendi
Wakil Ketua Umum Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	: dr. Sumarjati Arjoso, SKM.
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Tri Maryani
Ketua Bidang Pembangunan Masyarakat	: Sudewo, ST, MT
Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Dr. A.S. Kobalen, M.Phil, Ph.D.dillit.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I. UMUM - *lanjutan*

Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	: Agnes Marcelina
Ketua Bidang Perlindungan Fakir Miskin	: Soedarto SM
Ketua Bidang Perlindungan Ibu Hamil dan Menyusui	: Tjut Andjani Yuzar
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel	: Ariena
Ketua Bidang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	: Endang Wahyudi Mamahit
Ketua Bidang Komunikasi Sosial Masyarakat	: Martianis, SH
Ketua Bidang Pelayanan Sosial	: Ir. Hj. R. Monica Armi Soraya
Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Infrastruktur	: Susi Marleny Bachsin, SE, MM.
Ketua Bidang Pendidikan Nasional	: Prof. Dr.Ir. Djohar Arifin Husin
Ketua Bidang Pendidikan Tinggi	: Ir. Sumail Abdullah
Ketua Bidang Pendidikan Menengah	: Ir. Priscilia Ester Waworuntu, MT
Ketua Bidang Pendidikan Dasar	: Dr. Ririn Wulandari, SE, MM
Ketua Bidang Pendidikan Formal	: Indah Wahyuarini Retno U
Ketua Bidang Pendidikan Non Formal	: Martina, S.I.Kom, M.Si.
Ketua Bidang Kurikulum Pendidikan Nasional	: Indah Riyanti Brown
Ketua Bidang Kesenian Nasional	: Jamal Mirdad
Ketua Bidang Kebudayaan Nasional	: R. Wulandari (Mulan Jameela)
Ketua Bidang Perfilman Nasional	: Rachel Maryam Sayyidina
Ketua Bidang Perumahan Rakyat	: Ir. Meireza Endipat Wijaya
Ketua Bidang Konstruksi	: Sudarsono S, ST.
Ketua Bidang Pekerjaan Umum	: Ir. Aria Sulhan Witoelar
Ketua Bidang Percepatan dan Pembangunan Daerah	: Ir. Putri Tjatur Budilistyani, MM
Ketua Bidang Pembangunan Pedesaan	: Subuh Prabowo
Wakil Ketua Umum Bidang Agama	: Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan Hasyim)
Ketua Bidang Agama Islam	: H. Tabrani Syabirin, LC, MH.
Ketua Bidang Agama Kristen	: Dra. Vonny Sumampouw Pangemanan
Ketua Bidang Agama Katholik	: Haposan Paulus Batubara, SH
Ketua Bidang Agama Budha	: Romo Pdt. Gouw Tjeng Sun, S.Dt.B
Ketua Bidang Agama Hindu	: Ida Bagus Yoga Adi Putra, SH, M.Kn.
Ketua Bidang Agama Konghucu	: Sanjaya Sutandar
Sekretaris Jenderal	: H. Ahmad Muzani
Wakil Sekretaris Jenderal	: Brigjen TNI (Purn) Anwar Ende, SIP.
Bendahara Umum	: Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
Wakil Bendahara Umum	: Ir. Simon Aloysius Mantiri, ST, MBA : Satrio Dimas Adityo, MBA

Visi :

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Misi :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atas latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.

Fungsi dan Tugas

Fungsi :

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun dan merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan disegala bidang.
8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas :

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi aspek-aspek, ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
6. Mempersiapkan kader-kader Partai terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelenggaraan kekuasaan politik.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah ini :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Partai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Laporan keuangan Partai Gerindra hanya meliputi laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan merupakan laporan konsolidasi Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan bank

Kas dan bank mencakup kas dan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

c. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Tahun</u>	<u>%</u>
Kendaraan	8	12,5
Peralatan kantor	4	25
Perlengkapan kantor	4	25

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan aktifitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktifitas .

e. Aset Neto

Aset bersih digolongkan menjadi aset neto tidak terikat, terikat temporer, atau terikat permanen, tergantung ada tidaknya pembatasan. Partai menyajikan hibah atau wakaf berupa kas dan aset lainnya sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah berlalu, yaitu pada saat pembatasan masa telah berakhir atau pembatasan tujuan telah terpenuhi, aset neto terikat temporer digolongkan menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Sumber-sumber Keuangan Partai terdiri atas :

- Iuran wajib Anggota Partai
- Iuran sukarela Anggota Partai

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Aset Neto

- Iuran Pengurus Partai
- Sumbangan perorangan Anggota Partai
- Sumbangan perorangan bukan Anggota Partai paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- Sumbangan perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- Iuran Bulanan Anggota DPR dan DPRD dari Partai Gerindra sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji dan tunjangan, adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD.
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Daerah (APBN/APBD).

Aset neto yang berasal dari dana APBN jika merupakan sisa kas dana anggaran yang akan dikembalikan ke Kas Negara, tetapi jika berupa aset tetap akan dipindahkan ke Partai.

f. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi organisasi Nirlaba dan yang sejenisnya, dinyatakan bahwa bantuan atau sumbangan bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungannya antara pemberi dan penerima sumbangan. Oleh karena itu Partai tidak menghitung dan mengakui pajak kini.

g. Perubahan Aset Neto

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu :

- Pembatasan Permanen

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

- Pembatasan Temporer

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhi keadaan tertentu.

- Sumbangan Terikat

Adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.

- Sumbangan Tidak Terikat

Adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kas	631.853.795	259.799.196
Bank :		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-664-9217)	3.702.788.117	8.415.285.032
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-488-6712)	1.503.089.711	979.804.528
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(a/c 02-0601-003-052-303)	21.781.189	236.800.215
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-002-6263)	-	15.411.205
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-621-8328)	-	11.961.543
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (a/c 122-000-695-5291)	4.166.000	4.166.000
PT Bank Central Asia Tbk. (a/c 2063-00-5959)	3.330.650	3.890.650
Jumlah	<u>5.867.009.462</u>	<u>9.927.118.369</u>

4. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang Pengurus dan Anggota Partai	50.538.262.051	39.500.000.000
Piutang karyawan	73.100.000	73.250.000
Jumlah	<u>50.611.362.051</u>	<u>39.573.250.000</u>

Piutang Pengurus dan Anggota Partai

Akun ini merupakan jumlah pinjaman/kewajiban Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewajiban iuran anggota, pinjaman ini tidak ada jangka waktu pengembaliannya dan juga tidak dikenakan bunga.

5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Perbaikan gedung DPP Gerindra	7.447.200	34.255.700
Jumlah	<u>7.447.200</u>	<u>34.255.700</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET TETAP

Terdiri dari :

	31 Desember 2020			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Mutasi/Reklasifikasi		
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan :				
Kendaraan bermotor	2.752.950.000	542.000.000	-	3.294.950.000
Peralatan kantor	596.207.400	12.073.000	-	608.280.400
Perlengkapan kantor	240.370.600	45.917.600	-	286.288.200
Jumlah	3.589.528.000	599.990.600	-	4.189.518.600
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan bermotor	2.646.249.479	162.108.334	-	2.808.357.813
Peralatan kantor	447.017.192	67.709.204	-	514.726.396
Perlengkapan kantor	158.953.829	29.964.021	-	188.917.850
Jumlah	3.252.220.500	259.781.559	-	3.512.002.059
Nilai Buku	337.307.500			677.516.541

	31 Desember 2019			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Mutasi/Reklasifikasi		
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan :				
Kendaraan bermotor	2.752.950.000	-	-	2.752.950.000
Peralatan kantor	549.760.400	46.447.000	-	596.207.400
Perlengkapan kantor	165.994.600	74.376.000	-	240.370.600
Jumlah	3.468.705.000	120.823.000	-	3.589.528.000
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan bermotor	2.302.130.729	344.118.750		2.646.249.479
Peralatan kantor	375.888.967	71.128.225		447.017.192
Perlengkapan kantor	144.722.850	14.230.979	-	158.953.829
Jumlah	2.822.742.546	429.477.954	-	3.252.220.500
Nilai Buku	645.962.454			337.307.500

Biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan perubahan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 259.781.559 dan Rp. 429.477.954.

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan biaya jasa profesional yang masih harus dibayar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 44.400.000 dan 132.000.000.

8. HUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan hutang Partai atas pengurusan perpanjangan STNK mobil ambulance dari Perwakilan daerah-daerah seluruh Indonesia. Beban pengurusan STNK ini di tangani dahulu oleh daerah, selanjutnya akan ditagihkan ke Dewan Perwakilan Pusat. Dengan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 161.059.900.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pemilu 2019/2024	17.594.839.000	4.398.709.749
Pemilu 2014/2019	-	11.062.532.250
Jumlah	<u>17.594.839.000</u>	<u>15.461.241.999</u>

Pemilu 2019/2024

Berdasarkan Surat Keputusan Komite Pemilihan Umum Pusat No. 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum tahun 2019, yang menyebutkan jumlah perolehan kursi DPP Partai Gerindra tahun 2019 sebanyak 17.594.839 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara dengan nilai satu suara Rp. 1.000.

Dana bantuan yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp. 17.594.839.000 dan tahun 2019 untuk bulan Oktober - Desember (tiga bulan) sebesar Rp. 4.398.709.749.

Pemilu 2014/2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213-2664 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, nilai Bantuan Partai Politik untuk DPP Partai Gerindra tahun 2019 masing sebesar Rp. 11.062.532.250. Bantuan yang diterima berdasarkan jumlah suara yang diterima sebanyak 14.750.043 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh tiga) suara dengan nilai satu suara sebesar Rp. 1.000.

Dana bantuan yang diterima pada tahun 2019 untuk bulan Januari - September (sembilan bulan), dikarenakan ditahun 2019 dilaksanakan Pemilu untuk periode 2019/2024.

Dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah, digunakan untuk :

1. Pendidikan Politik

Untuk menunjang peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan partisipasi politik untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila akan dilakukan dalam kegiatan :

- a. Pelatihan Kader partai Gerakan Indonesia Raya
- b. Seminar dan diskusi rutin

2. Operasional Sekretariat

Untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik yang sesuai dengan Pasal 24 Bab VII dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 :

- a. Adiministrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan data dan arsip
- d. Pemeliharaan peralatan kantor

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Iuran anggota periode 2019/2024	11.758.500.000	1.822.500.000
Iuran anggota periode 2014/2019	-	8.856.000.000
Jumlah	<u>11.758.500.000</u>	<u>10.678.500.000</u>

Pemilu 2019/2024

Merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil Pemilu 2019/2024, dimana dari Pemilu tersebut Partai Gerindra mendapatkan kursi di Gedung DPR-RI sebanyak 78 kursi atau sekitar 12,57% dan setiap anggota DPR-RI Partai Gerindra membayar iuran sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, DPP Gerindra menerima iuran anggota sebesar Rp. 11.758.500.000 dan tahun 2019 DPP Gerindra menerima iuran anggota sebesar Rp. 1.822.500.000 untuk periode bulan November - Desember 2019 dari 78 orang anggota.

Iuran anggota periode 2014/2019

Merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil Pemilu 2014/2019, dimana dari Pemilu tersebut Partai Gerindra mendapatkan kursi di Gedung DPR-RI sebanyak 73 kursi atau sekitar 13,04% dan setiap anggota DPR-RI Partai Gerindra membayar iuran sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Untuk periode bulan Januari - Oktober 2019, DPP Gerindra menerima iuran anggota sebesar Rp. 8.856.000.000 dari 73 orang anggota.

11. IURAN ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Iuran anggota periode 2019/2024	130.647.073.791	37.152.658.453
Iuran anggota periode 2014/2019	-	36.403.717.885
Jumlah	<u>130.647.073.791</u>	<u>73.556.376.338</u>

Akun ini merupakan iuran wajib anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Provinsi dan Kabupaten, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Bab X Pasal 59, yaitu iuran bulanan DPR dan DPRD sebesar 25% dari gaji dan tunjangan.

Iuran anggota periode 2019/2024

Pada periode 2019/2024 iuran anggota DPRD per bulan mengalami kenaikan, untuk Dewan Pimpinan Daerah sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Dewan Pimpinan Cabang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per anggota. Dari iuran sebagian dikirim kembali ke daerah perwakilan masing-masing dan sebagian digunakan untuk operasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP). *Lihat catatan 21*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. IURAN ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA - lanjutan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, DPP Gerindra menerima iuran anggota sebesar Rp. 130.647.073.791 dan tahun 2019 sebesar Rp. 37.152.658.453 untuk periode bulan September - Desember 2019 dari Dewan Pimpinan Daerah 285 anggota dan Dewan Pimpinan Cabang 1.971 anggota.

Iuran anggota periode 2014/2019

Iuran anggota DPRD per bulan, untuk Dewan Pimpinan Daerah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Dewan Pimpinan Cabang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per anggota. Dari iuran sebagian dikirim kembali ke daerah perwakilan masing-masing dan sebagian digunakan untuk operasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Lihat catatan 21

Untuk periode bulan Januari - Agustus 2019 iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima sebesar Rp. 36.403.717.885 dari Dewan Pimpinan Daerah sebesar 235 anggota dan Dewan Pimpinan Cabang sebesar 1.843 anggota.

12. SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan sumbangan dari :

	<u>2019</u>
PT Arsari Pratama	8.442.500.000
Jumlah	<u>8.442.500.000</u>

PT Arsari Pratama

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari PT Arsari Pratama dan dana ini digunakan untuk kegiatan operasional Partai dan pembayaran jasa artis atas kampanye Pemilu 2019/2024.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2012 disebutkan bahwa sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar) per orang dalam 1 (satu) tahun anggaran dan perusahaan atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

13. SUMBANGAN PENGURUS

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari Pengurus Partai yang digunakan untuk biaya operasional Partai, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 600.000.000 dan Rp. 2.000.000.000.

14. PENERIMAAN LAIN-LAIN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jasagiro	365.081.915	254.880.196
Lain-lain	51.319.070	58.918.000
Jumlah	<u>416.400.985</u>	<u>313.798.196</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN PENERIMAAN KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendidikan Partai Politik	16.076.224.305	14.438.107.000
Pengadaan inventaris kantor	638.800.000	-
Listrik dan telepon	494.760.376	551.311.848
Beban transportasi dan perjalanan dinas	148.851.976	304.833.731
Media cetak dan elektronik	74.966.000	62.750.000
Beban rumah tangga	44.722.000	45.219.000
Beban rapat internal Pengurus	17.226.500	28.550.850
Beban pemeliharaan data dan arsip	14.792.667	19.155.875
Alat tulis kantor	82.447.676	10.255.695
Jasa pos dan giro	2.047.500	1.058.000
Jumlah	<u>17.594.839.000</u>	<u>15.461.241.999</u>

DPP Partai Gerindra telah menggunakan Bantuan Partai Politik (Banparpol) dengan memprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Proporsi Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar 91,37% dan 93,38% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat masing-masing sebesar 8,63% dan 6,62%.

Hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada :

- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
- b. Pasal 30 :
 1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
 2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

16. BEBAN KEGIATAN DPP

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban HUT Gerindra	734.492.825	648.000.000
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)	222.345.500	-
Jumlah	<u>956.838.325</u>	<u>648.000.000</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN PROGRAM BIDANG

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendidikan dan Latihan Gerindra Masa Depan (GMD)	314.902.095	4.402.891.250
Beban Bidang Kesehatan	5.952.657	-
Beban Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	-	2.500.000
Jumlah	<u>320.854.752</u>	<u>4.405.391.250</u>

Pendidikan dan Latihan Gerindra Masa Depan (GMD)

Akun ini merupakan beban atas pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk kader-kader Gerindra Masa Depan (GMD) yang dilaksanakan di Hambalang Bogor Jawa Barat.

18. BEBAN KEGIATAN SAYAP PARTAI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ambulance	313.200.000	-
Kesehatan Indonesia Raya (Kesira)	160.000.000	360.650.000
Perempuan Indonesia Raya (Pira))	110.000.000	55.000.000
Jumlah	<u>583.200.000</u>	<u>415.650.000</u>

19. BEBAN BAKTI SOSIAL

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kegiatan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sumbangan masyarakat	633.062.000	180.400.000
Jumlah	<u>633.062.000</u>	<u>180.400.000</u>

20. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban Digdaya TV	8.000.000.000	-
Atribut partai	335.000.000	100.000.000
Maintenance Website	151.690.500	-
Langganan majalah dan koran	960.000	4.735.000
Beban jasa artis	-	6.000.000.000
Media center dan team online	-	589.750.000
Beban Master Influencer	-	362.600.000
Beban Hukum dan Publikasi	-	100.000.000
Jumlah	<u>8.487.650.500</u>	<u>7.157.085.000</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN - lanjutan

Beban Digdaya TV

Akun ini merupakan biaya operasional setiap bulannya Digdaya TV (PT Digdaya Media Nusantara) yang digunakan untuk acara siaran Partai Gerindra di seluruh Indonesia.

Media center dan team online

Merupakan biaya yang dikeluarkan Partai atas pembuatan dan pemasangan iklan di media massa.

Atribut partai

Merupakan biaya yang dikeluarkan DPP Partai atas pembuatan kaos, bendera, pin serta biaya pengiriman atribut-atribut tersebut diseluruh Indonesia.

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban operasional	119.356.010.000	29.280.141.036
Gaji dan tunjangan	3.615.295.834	3.572.352.500
Beban transportasi dan perjalanan dinas	531.004.879	676.503.610
Alat tulis kantor dan percetakan	298.297.446	63.082.355
Beban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	266.568.329	140.731.216
Beban penyusutan aset tetap	259.781.559	429.477.953
Beban pemeliharaan	124.106.596	109.832.235
Beban jamuan	67.035.302	141.505.001
Beban rumah tangga	52.273.511	87.496.979
Beban jasa profesional	44.700.000	38.500.000
Beban konsumsi	37.455.028	97.500.000
Beban pajak PPh Pasal 21	33.747.500	54.878.500
Beban jasa keamanan dan kebersihan	22.574.000	17.100.000
Beban kebutuhan kantor	5.341.520	4.575.400
Listrik, telepon dan internet	4.720.000	140.671.236
Beban rapat internal Pengurus	4.359.021	17.161.501
Beban inventaris dan instalasi kantor	2.775.047	22.949.000
Perizinan, Hukum dan Advokasi	1.800.000	100.000.000
Biaya pengiriman barang	161.000	1.416.000
Beban iuran Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)	-	1.470.070.000
Lain-lain	312.252.085	240.080.610
Jumlah	<u>125.040.258.657</u>	<u>36.706.025.132</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KANTOR DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI - lanjutan

Beban Operasional

Akun ini terdiri dari :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban operasional Sekretariat	76.176.810.000	11.064.123.036
Beban operasional DPD dan DPC	42.272.500.000	15.126.340.000
Beban operasional Tim Online	698.000.000	2.444.500.000
Beban operasional Bendahara	<u>208.700.000</u>	<u>645.178.000</u>
Jumlah	<u>119.356.010.000</u>	<u>29.280.141.036</u>

Beban operasional DPD dan DPC

Akun ini merupakan beban operasional Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang dananya dari iuran bulanan anggota Dewan-Dewan Daerah setelah dipotong untuk biaya operasional Dewan Pimpinan Pusat. (lihat catatan 11)

Beban Iuran Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)

Akun ini merupakan bantuan Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk biaya operasional Koperasi Garudayaksa Nusantara sebesar Rp. 1.470.070.000 per 31 Desember 2019 dan tahun 2020 nihil.

22. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya administrasi bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 21.106.857 dan 13.200.350.

23. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang diselesaikan pada tanggal 17 April 2023.